

CALK TAHUN 2022

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi dan sebagai Entitas Pelaporan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun dengan Realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusuna Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Targer Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

- 5.1.1 Aset
- 5.1.2 Kewajiban
- 5.1.3 Ekuitas Dana

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.2.1 Pendapatan
- 5.2.2 Belanja

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

- 5.3.1 Pendapatan
- 5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Ekuitas

- 5.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH

2.1. Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya. Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan monitor, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor,

2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Kebijakan Pembangunan daerah dibidang kepegawaian diarahkan pada penyiapan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas secara proporsional disemua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja disetiap OPD, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan SDM aparatur daerah berdasarkan standar kompetensi. Dengan demikian pembangunan bidang kepegawaian akan dapat mewujudkan manajemen yang mampu menghasilkan PNS daerah yang profesional, yang didukung dengan pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, sehingga terwujud sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi.

Kedepan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan penataan diri baik Manusia Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanan untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
2. Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan merit system
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah:

1. Indikator Kinerja 1 (pertama) : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya database kepegawaian.
 - b. Tersedianya sistem pengelolaan data kepegawaian yang baik
 - c. Terlaksananya pengelolaan pengurusan kenaikan pangkat
 - d. Terlaksananya pengurusan SK Pensiun
 - e. Terlaksananya pengolahan pengurusan karpeg dan karis, karsu
 - f. Terlaksananya pengolahan pengurusan taspen
2. Indikator Kinerja II (kedua) : Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan merit system ,dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya seleksi CPNS
 - b. Terlaksananya Pendataan kebutuhan Pegawai di Daerah
 - c. Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat structural
 - d. Terlaksananya diklat kepegawaian
 - e. Meningkatnya kesempatan ASN Mengikuti tugas belajar
 - f. Meningkatnya pembinaan disiplin PNS
 - g. Tersosialisasinya aturan disiplin PNS
 - h. Terlaksananya pengisian JPT
 - i. Terlaksananya pengisian jabatan struktural
3. Indikator Kinerja III (ketiga) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Menigkatnya kualitas layanan internal BKPSDM kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Meningkatnya kualitas perencanaan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

Guna tercapainya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, Adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Kepegawaian Daerah.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3. Pencapaian Targer Kinerja APBD Perangkat Daerah

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian targert kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskanj faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasai Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp.7.810.890.365,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.7.769.501.519,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 41.388.846,- dengan realisasi sebesar Rp.7.234.453.713,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 7.195.793.713,- dan Belanja Modal sebesar Rp.38.660.000,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 92,62%, terdiri dari 92,62% untuk Belanja Operasi dan 93,41% untuk Belanja Modal.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni :

1. Pada Program Kepegawaian Daerah , Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK anggaran yang tidak dapat direalisasikan adalah belanja jasa penyelenggaraan acara (sewa laptop) dan belanja perjalanan dinas biasa yang direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan seleksi CASN formasi kesehatan dan teknis di Padang, namun kegiatan pengadaan formasi tahun 2022 hanya dilakukan untuk JF guru yang telah dilakukan ujian pada tahun 2021, sehingga sewa laptop serta perjalanan dinas biasa tidak dapat direalisasikan/direalisasikan sepenuhnya.
2. Masih lemahnya perencanaan dari masing-masing PPTK mengenai perencanaan kegiatan yang dikelolanya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi Kembali target pencapaian kegiatan dan melakukan pendekatan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Fungsi : 5.03.5.04.0.00.01.0000.

Kabupaten : Pesisir Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		Jumlah Dana	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	KET
				Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu		
	BKPSDM		7,810,890,365	7,234,453,713	92.62	96.33	
	BELANJA OPERASI		7,769,501,519	7,195,793,713	92.62	96.33	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		5,288,970,169	5,203,424,752	98.38	100.78	
	DAERAH KABUPATEN / KOTA						
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		38,344,460	38,015,990	99.14	100.00	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38,344,460	38,015,990	99.14	100.00	
	Belanja Operasi		38,344,460	38,015,990	99.14	100.00	
a	Belanja Barang dan Jasa		38,344,460	38,015,990	99.14	100.00	
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		4,294,016,479	4,226,429,058	98.43	100.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4,177,796,835	4,113,992,864	98.47	100.00	
	Belanja Operasi		4,177,796,835	4,113,992,864	98.47	100.00	
a	Belanja Pegawai		4,177,796,835	4,113,992,864	98.47	100.00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		116,219,644	112,436,194	96.74	100.00	
	Belanja Operasi		116,219,644	112,436,194	96.74	100.00	
a	Belanja Pegawai		77,280,000	77,280,000	100.00	100.00	
b	Belanja Barang dan Jasa		38,939,644	35,156,194	90.28	100.00	
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		589,283,473	582,149,532	98.79	100.00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		7,370,220	7,256,570	98.46	100.00	
	Belanja Operasi		7,370,220	7,256,570	98.46	100.00	
a	Belanja Barang dan Jasa		7,370,220	7,256,570	98.46	100.00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36,713,006	35,506,716	96.71	100.00	
	Belanja Operasi		36,713,006	35,506,716	96.71	100.00	
a	Belanja Barang dan Jasa		36,713,006	35,506,716	96.71	100.00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		31,500,000	31,477,800	99.93	100.00	
	Belanja Operasi		31,500,000	31,477,800	99.93	100.00	
a	Belanja Barang dan Jasa		31,500,000	31,477,800	99.93	100.00	

	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5,400,000	5,400,000	100.00	100.00
		Belanja Operasi	5,400,000	5,400,000	100.00	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	5,400,000	100.00	100.00
	5	Fasilitas kunjungan tamu	6,775,247	6,765,000	99.85	100.00
		Belanja Operasi	6,775,247	6,765,000	99.85	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	6,775,247	6,765,000	99.85	100.00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	501,525,000	495,743,446	98.85	100.00
		Belanja Operasi	501,525,000	495,743,446	98.85	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	501,525,000	495,743,446	98.85	100.00
	D.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	151,910,033	145,271,513	95.63	100.00
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	107,874,253	102,709,603	95.21	100.00
		Belanja Operasi	107,874,253	102,709,603	95.21	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	107,874,253	102,709,603	95.21	100.00
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44,035,780	42,561,910	96.65	100.00
		Belanja Operasi	44,035,780	42,561,910	96.65	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	44,035,780	42,561,910	96.65	100.00
	E.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	215,415,724	211,558,659	98.21	100.00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,375,760	113,103,159	98.89	100.00
		Belanja Operasi	114,375,760	113,103,159	98.89	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	114,375,760	113,103,159	98.89	100.00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,764,964	18,335,500	92.77	100.00
		Belanja Operasi	19,764,964	18,335,500	92.77	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	19,764,964	18,335,500	92.77	100.00
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	81,275,000	80,120,000	98.58	100.00
		Belanja Operasi	81,275,000	80,120,000	98.58	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	81,275,000	80,120,000	98.58	100.00
	II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,062,808,810	652,776,910	61.42	79.64
	A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	500,875,250	140,940,805	28.14	58.48
	1	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	411,136,580	62,132,520	15.11	50.88
		Belanja Operasi	411,136,580	62,132,520	15.11	50.88
	a.	Belanja Pegawai	7,200,000	6,200,000	86.11	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	403,936,580	55,932,520	13.85	50.00
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10,016,270	10,013,240	99.97	100.00
		Belanja Operasi	10,016,270	10,013,240	99.97	100.00
	a.	Belanja Pegawai	0			
	b.	Belanja Barang dan Jasa	10,016,270	10,013,240	99.97	100.00
	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61,932,000	58,495,945	94.45	100.00
		Belanja Operasi	61,932,000	58,495,945	94.45	100.00
	a.	Belanja Pegawai				
	b.	Belanja Barang dan Jasa	61,932,000	58,495,945	94.45	100.00

	4	Pengelolaan Data Kepegawaian	17,790,400	10,299,100	57.89	66.27
		Belanja Operasi	17,790,400	10,299,100	57.89	66.27
	a	Belanja Pegawai	6,000,000	-	0.00	0.00
	b	Belanja Barang dan Jasa	11,790,400	10,299,100	87.35	100.00
	B	Mutasi dan Promosi ASN	345,051,620	329,246,750	95.42	97.57
	1	Pengelolaan Mutasi ASN	103,758,110	101,353,920	97.68	100.00
		Belanja Operasi	103,758,110	101,353,920	97.68	100.00
	a	Belanja Pegawai	0	-		
	b	Belanja Barang dan Jasa	103,758,110	101,353,920	97.68	100.00
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	112,632,090	110,603,340	98.20	98.40
		Belanja Operasi	112,632,090	110,603,340	98.20	98.40
	a	Belanja Pegawai	7,200,000	5,400,000	75.00	75.00
	b	Belanja Barang dan Jasa	105,432,090	105,203,340	99.78	100.00
	3	Pengelolaan Promosi ASN	128,661,420	117,289,490	91.16	94.87
		Belanja Operasi	128,661,420	117,289,490	91.16	94.87
	a	Belanja Pegawai	6,600,000	-	0.00	0.00
	b	Belanja Barang dan Jasa	122,061,420	117,289,490	96.09	100.00
	C	Pengembangan Kompetensi ASN	94,704,210	68,048,133	71.85	100.00
	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	75,765,400	52,964,323	69.91	100.00
		Belanja Operasi	75,765,400	52,964,323	69.91	100.00
	a	Belanja Pegawai		-		
	b	Belanja Barang dan Jasa	75,765,400	52,964,323	69.91	100.00
	2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	18,938,810	15,083,810	79.64	100.00
		Belanja Operasi	18,938,810	15,083,810	79.64	100.00
	a	Belanja Barang dan Jasa	18,938,810	15,083,810	79.64	100.00
	D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	122,177,730	114,541,222	93.75	100.00
	1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19,639,950	16,788,600	85.48	100.00
		Belanja Operasi	19,639,950	16,788,600	85.48	100.00
	a	Belanja Barang dan Jasa	19,639,950	16,788,600	85.48	100.00
	2	Pembinaan Disiplin ASN	102,537,780	97,752,622	95.33	100.00
		Belanja Operasi	102,537,780	97,752,622	95.33	100.00
	a	Belanja Pegawai		-		
	b	Belanja Barang dan Jasa	102,537,780	97,752,622	95.33	100.00
	III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,417,722,540	1,339,592,051	94.49	95.03
	A	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,417,722,540	1,339,592,051	94.49	95.03
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,417,722,540	1,339,592,051	94.49	95.03
		Belanja Operasi	1,417,722,540	1,339,592,051	94.49	95.03
	a	Belanja Pegawai	7,800,000	7,800,000	100.00	100.00
	b	Belanja Barang dan Jasa	1,409,922,540	1,331,792,051	94.46	95.00

BELANJA MODAL		41,388,846	38,660,000	93.41	100.00
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	41,388,846	38,660,000	93.41	100.00
	DAERAH KABUPATEN / KOTA				
A	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	41,388,846	38,660,000	93.41	100.00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,388,846	38,660,000	93.41	100.00
	Belanja Modal	41,388,846	38,660,000	93.41	100.00
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,388,846	38,660,000	93.41	100.00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyajikan Kembali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan secara kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Pada Tahun 2022 sudah menerapkan Laporan Keuangan berbasis akrual. Laporan Keuangan berbasis akrual ini meliputi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.1.2. Persediaan

5.1.1.1.2.1. Persediaan Bahan Habis Pakai

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
I.	Alat Tulis Kantor			
1	Kertas HVS Folio	2 rim	60.500,-	121.000,-
2	Kertas HVS Kuarto	5 rim	56.650,-	283.250,-
3	Buku Ekspedisi Folio	1 buah	31.350,-	31.350,-
4	Map Gungyu	2 buah	38.280,-	76.560,-
Jumlah				512.160,-

5.1.1.2. Aset Tetap

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Tanah		
2.	Peralatan dan Mesin	38.660.000,-	
3.	Gedung dan Bangunan	14.400.000,-	
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan		
5.	Aset Tetap Lainnya		
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
7.	Akumulasi Penyusutan		
Jumlah		53.060.000,-	

Rincian mutasi aset terdiri dari :

No.	Uraian	2022 (RP)
1	Belanja Modal dan Penilaian	38.660.000,-
2	Belanja Barang / Jasa	0,-
3	Gedung dan Bangunan	14.400.000,-
4	Hibah	0,-
5	Mutasi Masuk	0,-
6	Reklasifikasi	0,-
7	Koreksi	0,-
8	Penilaian	0,-
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
10	Penghapusan	0,-
11	Extrakontable	0,-
12	Reklasifikasi	0,-
13	Hibah	0,-
14	Mutasi Keluar	0,-
15	Koreksi	0,-
16	Penyusutan	0,-
Jumlah		53.060.000,-

5.1.1.2.1. Tanah

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Tanah	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	0.-	0.-
2	Alat Kantor	0.-	0.-
3	Alat Rumah Tangga	0.-	0.-
4	Komputer	0.-	0.-
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.-	0.-
6	Alat Studio	0.-	0.-
7	Alat Komunikasi	0.-	0.-
8	Printer	13.000.000,-	0.-
9	Lemari	25.660.000,-	0.-
Jumlah		38.660.000,-	0.-

Pada tahun 2022 ini terjadi penambahan Peralatan dan Mesin

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.400.000.-	0.-
2	Bangunan Lainnya		
Jumlah		14.400.000.-	0.-

Pada tahun 2022 ini terjadi penambahan Gedung dan Bangunan

5.1.1.2.4. Jalan, Irigasi & Jaringan

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Instalasi Lainnya	0.-	0.-
Jumlah		0.-	0.-

5.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Buku	0.-	0.-
2	Tanaman	0.-	0.-
Jumlah		0.-	0.-

5.1.1.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1.	Kontruksi dalam Pengerjaan	0.-	0.-
Jumlah		0.-	0.-

5.1.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.-	0.-
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.-	0.-
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.-	0.-
Jumlah		0.-	0.-

5.1.1.2.8. Aset Lainnya

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0.-	0.-
2	Akuntansi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.-	0.-
3	Aset Lain-Lain	0.-	0.-
Jumlah		0.-	0.-

5.1.2. Ekuitas

5.1.3.1. Ekuitas

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Ekuitas	1.292.259.339,-	0.-
2	Surplus/Defisit – LRA	-7.181.767.973,-	0.-
3	R/K PPKD	7.233.253.713,-	0.-
Jumlah		1.343.745.079,-	0,-

5.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Kekeyaan Daerah (Rumah Dinas)	12.000.000,-	12.000.000,-
Jumlah		12.000.000,-	12.000.000,-

5.2.2. Belanja

5.2.2.1 Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
A.	Belanja	7.810.890.365,-	7.234.453.713,-
I.	Belanja Operasi	7.769.501.519,-	7.195.793.713,-
1	Belanja Pegawai	4.289.876.835,-	4.212.472.864,-
2	Belanja Barang dan Jasa	3.479.624.684,-	2.983.320.849,-

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.789.605.585,-	2.742.838.946,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.388.191.250,-	1.371.153.918,-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.080.000,-	98.480.000,-
Jumlah		4.289.876.835,-	4.212.472.864,-

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	721.510.007,-	650.829.667,-
2	Belanja Jasa Kantor	1.265.518.753,-	975.061.903,-
3	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	5.439.644,-	2.691.194,-
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.500.000,-	13.500.000,-
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,-	14.000.000,-
6	Belanja Pemeliharaan	44.416.280,-	43.869.785,-
7	Belanja Perjalanan Dinas	1.414.240.000,-	1.283.368.300,-
Jumlah		3.479.624.684,-	2.856.995.543,-

5.2.2.2 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
A.	Belanja	7.810.890.365,-	7.234.453.713,-
II.	Belanja Modal	41.388.846,-	38.660.000,-

5.2.2.2.1 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.180.680,-	25.660.000,-
2	Belanja Modal Komputer	13.208.166,-	13.000.000,-
Jumlah		41.388.846,-	38.660.000,-

5.3. Penjelasan Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

5.3.1.1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2022 (Rp)
1	Retribusi Kekeyaan Daerah (Rumah Dinas) - LO	1.200.000.-
Jumlah		1.200.000.-

5.3.2 Beban

5.3.2.1 Beban Operasi

No.	Uraian	2022 (Rp)
I.	Beban Pegawai	4.212.472.864,-
II.	Beban Barang dan Jasa	2.983.320.849,-
Jumlah		7.195.793.713,-

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

No.	Uraian	2022 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.838.946,-

2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.371.153.918,-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.480.000,-
Jumlah		4.212.472.864,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2022 (Rp)
1	Beban Bahan Habis Pakai	650.829.667,-
2	Beban Jasa Kantor	975.061.903,-
3	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.691.194,-
4	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	2.691.194,-
5	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	14.000.000,-
6	Beban Pemeliharaan	43.869.785,-
7	Beban Perjalanan Dinas	1.283.368.300,-
Jumlah		2.856.995.543,-

5.2.2.2 Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
A.	Belanja	7.810.890.365,-	7.234.453.713,-
II.	Belanja Modal	41.388.846,-	38.660.000,-

5.2.2.2.1 Belanja Modal

No.	Uraian	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.660.000,-
2	Belanja Modal Komputer	13.000.000,-
Jumlah		38.660.000,-

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit, laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi

mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2022 (RP)	2021 (RP)
1	Ekuitas	1.292.259.339,-	0.-
2	Surplus/Defisit - LO	-7.181.767.973,-	0.-
3	R/K PPKD	7.233.253.713,-	0.-
Jumlah		1.343.745.079,-	0,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama Lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan: “Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka untuk pembentukan Lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Kab. Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian berganti menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh **Bapak Tamsir, S.H.,M.M**

Sebagai Lembaga yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

menetapkan misi meningkatkan sistem pelayanan kepegawaian dan meningkatnya sistem karir PNS sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani secara tepat, efisien, efektif sesuai kebutuhan yang berciri transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan menyadari bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan Amanah yang wajib dijalankan secara professional dan religious sehingga dapat terwujud aparatur yang berkompetensi, professional, bermoral, netral, serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

6.2. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
2. Meningkatnya sistem karir PNS berdasarkan merit system
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja sebagai berikut;

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Fungsi

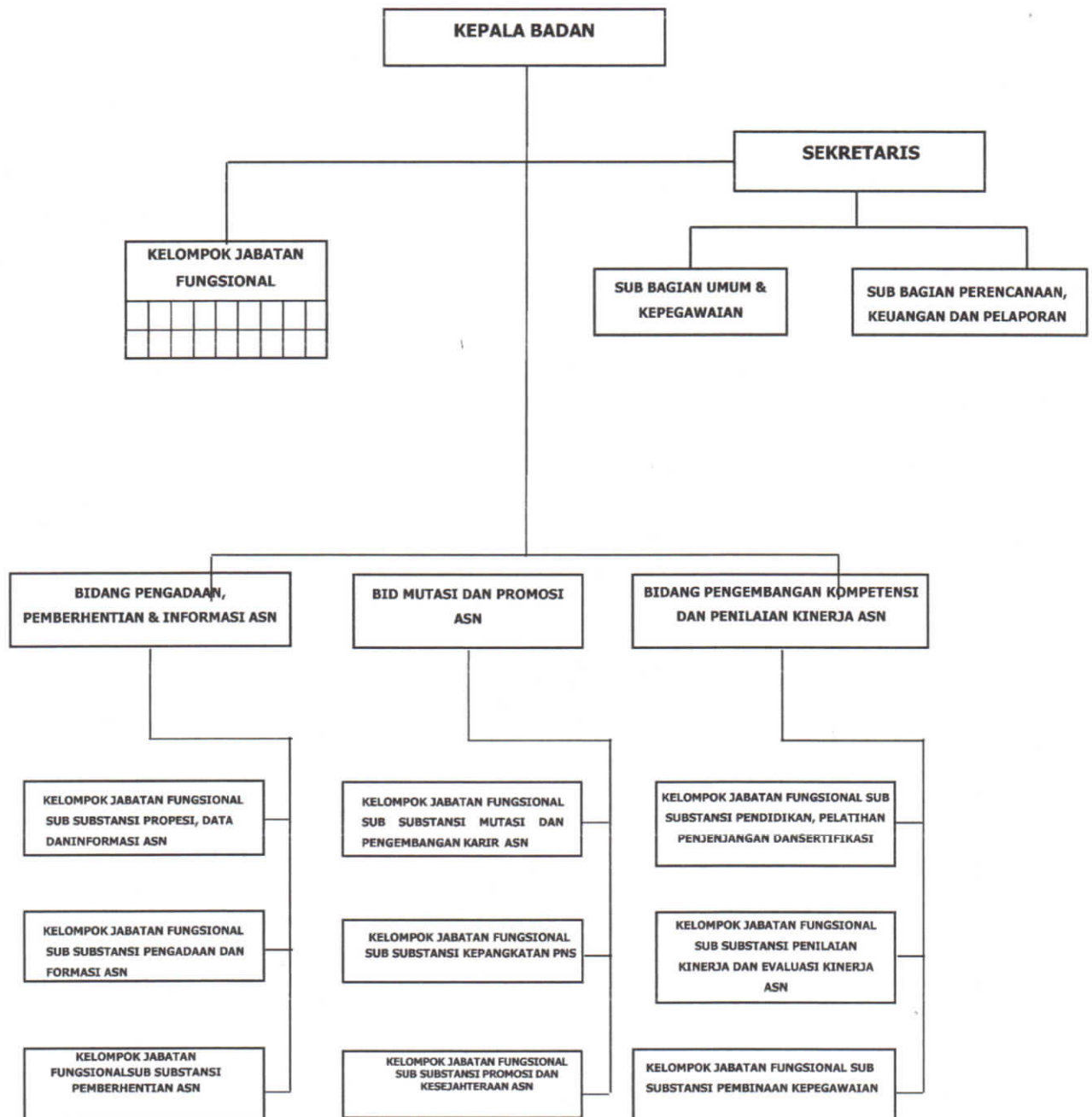
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungannya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

6.4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi dua sub bagian, dan tiga Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing-masing tiga Kelompok Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	1.200.000,00	-	-
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.200.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	7.810.890.365,00	7.234.453.713,00	92,62	-
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	7.769.501.519,00	7.195.793.713,00	92,62	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.289.876.835,00	4.212.472.864,00	98,20	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.789.605.585,00	2.742.838.946,00	98,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.045.283.594,00	2.019.832.987,00	98,76	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.045.283.594,00	2.019.832.987,00	98,76	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	177.172.501,00	174.990.595,00	98,77	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.718.000,00	168.285.000,00	98,57	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.718.000,00	168.285.000,00	98,57	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.297.850,00	55.529.850,00	98,64	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.297.850,00	55.529.850,00	98,64	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.518.000,00	50.195.000,00	99,36	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.518.000,00	50.195.000,00	99,36	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.450.152,00	117.247.980,00	98,99	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.450.152,00	117.247.980,00	98,99	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.859.916,00	5.768.163,00	98,43	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.859.916,00	5.768.163,00	98,43	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.240,00	28.536,00	97,59	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.240,00	28.536,00	97,59	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	135.649.098,00	134.346.692,00	99,04	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	135.649.098,00	134.346.692,00	99,04	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.223.029,00	4.153.555,00	98,35	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.223.029,00	4.153.555,00	98,35	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.669.032,00	12.460.588,00	98,35	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.669.032,00	12.460.588,00	98,35	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.735.173,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.735.173,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.388.191.250,00	1.371.153.918,00	98,77	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.388.191.250,00	1.371.153.918,00	98,77	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.080.000,00	98.480.000,00	87,87	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	91.080.000,00	77.480.000,00	85,07	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	91.080.000,00	77.480.000,00	85,07	-
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.479.624.684,00	2.983.320.849,00	85,74	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	721.510.007,00	650.829.667,00	90,20	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	721.510.007,00	650.829.667,00	90,20	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	127.230.964,00	113.207.737,00	88,98	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.000.000,00	20.999.474,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.695.760,00	12.180.000,00	95,94	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.890.696,00	144.527.986,00	95,15	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	108.012.860,00	98.653.300,00	91,33	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.900.000,00	3.850.000,00	98,72	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.363.940,00	6.356.570,00	99,88	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.025.180,00	26.561.910,00	94,78	-
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	143.000,00	143.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	675.860,00	675.860,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.892.000,00	91.108.215,00	80,70	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	125.014.500,00	109.020.615,00	87,21	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.665.247,00	23.545.000,00	99,49	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.299.458.397,00	1.005.253.097,00	77,36	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.265.518.753,00	975.061.903,00	77,05	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	115.800.000,00	95.950.000,00	82,86	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	126.800.000,00	125.400.000,00	98,90	-
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.800.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	3.400.000,00	2.400.000,00	70,59	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	700.000,00	675.000,00	96,43	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.250.000,00	61.000.000,00	96,44	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	257.087.500,00	14.371.500,00	5,59	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	483.372.000,00	468.216.000,00	96,86	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	4.512.500,00	4.255.000,00	94,29	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	100.961.753,00	96.054.603,00	95,14	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	2.344.800,00	97,70	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	57.635.000,00	57.595.000,00	99,93	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.439.644,00	2.691.194,00	49,47	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.800.000,00	2.060.290,00	42,92	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	289.142,00	280.402,00	96,98	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	350.502,00	350.502,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	-
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	44.416.280,00	43.869.785,00	98,77	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.456.280,00	25.954.785,00	98,10	-
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000,00	4.654.785,00	96,97	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.006.280,00	900.000,00	89,44	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.960.000,00	17.915.000,00	99,75	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.560.000,00	14.560.000,00	100,00	-
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.400.000,00	3.355.000,00	98,68	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.414.240.000,00	1.283.368.300,00	90,75	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.414.240.000,00	1.283.368.300,00	90,75	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.179.090.000,00	1.061.628.300,00	90,04	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	235.150.000,00	221.740.000,00	94,30	-
5.2	BELANJA MODAL	41.388.846,00	38.660.000,00	93,41	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.388.846,00	38.660.000,00	93,41	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	28.180.680,00	25.660.000,00	91,06	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.208.166,00	13.000.000,00	98,42	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.809.690.365,00)	(7.233.253.713,00)	92,62	-

Painan, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H. MM

NIP. 19670312 198803 1 003

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2022	2021
EKUITAS AWAL		1,292,259,339	
SURPLUS/DEFISIT-LO	-	7,181,767,973	
RK		7,233,253,713	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		-	
Koreksi Nilai Persediaan		-	
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang		-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		-	
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain		-	
Koreksi Ekuitas - Penyusutan		-	
Koreksi Ekuitas - Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir		-	-
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable		-	-
Koreksi Ekuitas - Utang		-	-
Koreksi Ekuitas - Amortisasi		-	-
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Ekuitas - Lain-lain		-	-
		-	-
		-	-
EKUITAS AKHIR		1,343,745,079	1,292,259,339

Painan, 31 Desember 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia



TAMSIR, S.H..M.M

NIP. 19670312 198803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
DAERAH-LO				
JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000,00	0.00	1,200,000.00	100.00
	7.195.793.713,00	0.00	7,195,793,713.00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.838.946,00	0.00	2,742,838,946.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	2.019.832.987,00	0.00	2,019,832,987.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	2.019.832.987,00	0.00	2,019,832,987.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	174.990.595,00	0.00	174,990,595.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	174.990.595,00	0.00	174,990,595.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	168.285.000,00	0.00	168,285,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	168.285.000,00	0.00	168,285,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	55.529.850,00	0.00	55,529,850.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	55.529.850,00	0.00	55,529,850.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.195.000,00	0.00	50,195,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.195.000,00	0.00	50,195,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	117.247.980,00	0.00	117,247,980.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	117.247.980,00	0.00	117,247,980.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.768.163,00	0.00	5,768,163.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.768.163,00	0.00	5,768,163.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	28.536,00	0.00	28,536.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.536,00	0.00	28,536.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	134.346.692,00	0.00	134,346,692.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.346.692,00	0.00	134,346,692.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.153.555,00	0.00	4,153,555.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.153.555,00	0.00	4,153,555.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.460.588,00	0.00	12,460,588.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.460.588,00	0.00	12,460,588.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.371.153.918,00	0.00	1,371,153,918.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.371.153.918,00	0.00	1,371,153,918.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.371.153.918,00	0.00	1,371,153,918.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.480.000,00	0.00	98,480,000.00	100.00
Beban Honorarium	77.480.000,00	0.00	77,480,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	77.480.000,00	0.00	77,480,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	21.000.000,00	0.00	21,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.000.000,00	0.00	21,000,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	650.829.667,00	0.00	650,829,667.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis	650.829.667,00	0.00	650,829,667.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.207.737,00	0.00	113,207,737.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.999.474,00	0.00	20,999,474.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.180.000,00	0.00	12,180,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	144.527.986,00	0.00	144,527,986.00	100.00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	98.653.300,00	0,00	98.653.300,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.356.570,00	0,00	6.356.570,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.561.910,00	0,00	26.561.910,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	675.860,00	0,00	675.860,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	91.108.215,00	0,00	91.108.215,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	109.020.615,00	0,00	109.020.615,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.545.000,00	0,00	23.545.000,00	100,00
Beban Jasa	1.005.253.097,00	0,00	1.005.253.097,00	100,00
Beban Jasa Kantor	975.061.903,00	0,00	975.061.903,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.950.000,00	0,00	95.950.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.400.000,00	0,00	125.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	14.371.500,00	0,00	14.371.500,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	468.216.000,00	0,00	468.216.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	96.054.603,00	0,00	96.054.603,00	100,00
Beban Langganan Jurna/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertizinan	2.344.800,00	0,00	2.344.800,00	100,00
Beban Lembur	57.595.000,00	0,00	57.595.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.691.194,00	0,00	2.691.194,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.060.290,00	0,00	2.060.290,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	280.402,00	0,00	280.402,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	350.502,00	0,00	350.502,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	43.869.785,00	0,00	43.869.785,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.954.785,00	0,00	25.954.785,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.654.785,00	0,00	4.654.785,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.915.000,00	0,00	17.915.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas	1.283.368.300,00	0.00	1.283.368.300,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.283.368.300,00	0.00	1.283.368.300,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.061.628.300,00	0.00	1.061.628.300,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	221.740.000,00	0.00	221.740.000,00	100.00
JUMLAH BEBAN	7.195.793.713,00	0.00	7.195.793.713,00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.194.593.713,00)	0.00	(7.194.593.713,00)	100.00

Painan, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH DAERAH
Permendagri 64 Tahun 2013

Kode Akun		Uraian Akun	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2021						Mutasi Kurang				Saldo per 31 Desember 2021	
			Belanja Modal	Belanja Pegawai/Bantuan Dikapitalisir	Mutasi dari SKPD Lain	Hibah Diterima	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke SKPD Lain	Hibah Diberikan	Penghapusan	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Kurang
1 3		ASET TETAP	38,660,000	14,400,000	-	-	-	-	53,060,000	-	-	-	-	-	1,300,360,288
1 3 1		Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 3 2		Peralatan dan Mesin	38,660,000	-	-	-	-	-	38,660,000	-	-	-	-	-	2,343,116,985
1 3 3		Gedung dan Bangunan	-	14,400,000	-	-	-	-	14,400,000	-	-	-	-	-	1,332,859,924
1 3 4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,952,450
1 3 5		Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,725,248
1 3 6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 3 7		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,502,294,489)
1 5		ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 1		Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 2		Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 3		Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,377,355
1 5 3 06		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98,377,385)
1 5 4		Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,835,631
1 5 4		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,835,631)
			38,660,000	14,400,000	-	-	-	-	53,060,000	-	-	-	-	-	1,300,360,288

BM LRA 2 53,060,000

Pelaksanaan, 31 Desember 2022

KABUPATEN
KEPALA BAHAN
KEPELOMPOKAN DAN
KEPELOMPOKAN
KEMERANGAN
SOMBER DAYA
MANUSIA
DAN PENERANGAN
PESIR S

PEMERINTAH KABUPATEN
DAN PENERANGAN
PESIR S

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 DAN 2021

No.	URAIAN	Ref. CALK	2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-
5	Kas BLUD		-	-	-	-
6	Kas BOS		-	-	-	-
7	Kas Lainnya		-	-	-	-
8	Piutang Pajak		-	-	-	-
9	Penyisihan Piutang Pajak		-	-	-	-
10	Piutang Pajak Netto		-	-	-	-
11	Piutang Retribusi		-	-	-	-
12	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-	-	-
13	Piutang Retribusi Netto		-	-	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Da		-	-	-	-
15	Penyisihan Piutang Hasil Pengelola		-	-	-	-
16	Piutang Hasil Pengelola		-	-	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Da		-	-	-	-
18	Penyisihan Bagian Lancar Tuntuta		-	-	-	-
19	Bagian Lancar Tuntutan		-	-	-	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
21	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD		-	-	-	-
22	Piutang Lain-lain PAD ya		-	-	-	-
23	Piutang kepada Pihak Ketiga		-	-	-	-
24	Piutang Lainnya		-	-	-	-
25	Penyisihan Piutang		-	-	-	-
26	Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	-
27	Persediaan		512,160.00	512,160.00	1,123,420.00	1,123,420.00
28	Aset Lancar Lainnya		-	-	-	-
29	Jumlah Aset Lancar		512,160.00	512,160.00	1,123,420.00	1,123,420.00
30	ASET TETAP					
31	Tanah		-	-	-	-
32	Peralatan dan Mesin		2,343,116,954.71	38,660,000.00	-	2,304,456,954.71
33	Gedung dan Bangunan		1,332,859,924.33	14,400,000.00	-	1,318,459,924.33
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		76,952,650.00	-	-	76,952,650.00
35	Aset Tetap Lainnya		49,725,247.77	-	-	49,725,247.77
36	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-	-	-

37	Akumulasi Penyusutan		(2,502,294,489,01)	-	-	(2,502,294,489,01)
38	Jumlah Aset Tetap		1,300,360,287.80	53,060,000.00	-	1,247,300,287.80
39	ASET LAINNYA		-	-	-	-
40	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-	-	-
41	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-	-	-
42	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-	-	-
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-
44	Aset Tidak Berwujud		98,377,355.00	-	-	98,377,355.00
45	Akumulasi Amortisasi		(98,377,355.00)	-	-	(98,377,355.00)
46	Aset Non Lancar Lainnya		-	-	-	-
47	Aset Lain-lain		43,835,631.00	-	-	43,835,631.00
48	Jumlah Aset Lainnya		43,835,631.00	-	-	43,835,631.00
49	TOTAL ASET		1,344,708,078.80	53,572,160.00	1,123,420.00	1,292,259,338.80
50			-	-	-	-
51	KEWAJIBAN		-	-	-	-
52	Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	-
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-	-	-
54	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment Fee</i>		-	-	-	-
55	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-	-
56	Utang Beban		-	-	-	-
57	Utang Jangka Pendek Lainnya		963,000.00	963,000.00	-	-
58	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		963,000.00	963,000.00	-	-
59	TOTAL KEWAJIBAN		963,000.00	963,000.00	-	-
60			-	-	-	-
61	EKUITAS		-	-	-	-
62	Ekuitas		1,343,745,078.80	52,609,160.00	1,123,420.00	1,292,259,338.80
63	TOTAL EKUITAS		1,343,745,078.80	52,609,160.00	1,123,420.00	1,292,259,338.80
64			-	-	-	-
65	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,344,708,078.80	53,572,160.00	1,123,420.00	1,292,259,338.80

Painan, 31 Desember 2022



LO

No	Uraian	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian		Setelah Penyesuaian	2022
			Tambah	Kurang		
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah				-	
5	Pendapatan Retribusi Daerah	1,200,000			1,200,000	
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-	
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				-	
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,200,000	-	-	1,200,000	-
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER					
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
12	Dana Bagi Hasil Pajak				-	
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				-	
14	Dana Alokasi Umum				-	
15	Dana Alokasi Khusus				-	
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana	-	-	-	-	-
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
19	Dana Otonomi Khusus				-	
20	Dana penyesuaian				-	
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya	-	-	-	-	-
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				-	
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				-	
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
27	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah				-	

31	Pendapatan Dana Darurat								
32	Pendapatan Lainnya								
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		-						-
34	JUMLAH PENDAPATAN		1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
35									
36	BEBAN								
37	Beban Pegawai		4,212,472,864	-				4,212,472,864	
38	Beban Persediaan		427,155,837	1,123,420			512,160	427,767,097	
39	Beban Jasa		1,228,926,927	963,000			-	1,229,889,927	
40	Beban Pemeliharaan		43,869,785				14,400,000	29,469,785	
41	Beban Pertalanan Dinas		1,283,368,300					1,283,368,300	
42	Beban Bunga								
43	Beban Subsidi								
44	Beban Hibah								
45	Beban Bantuan Sosial								
46	Beban Penyusutan dan Penyisihan			-					
47	Beban Transfer								
48	Beban Lain-lain								
49	JUMLAH BEBAN		7,195,793,713	2,086,420		14,912,160		7,182,967,973	-
50									
51	Surplus/Defisit Dari Operasi		-	7,194,593,713	-	2,086,420	-	14,912,160	-
52									
53	Surplus/Defisit Dari Non Operasional		-	-		-		-	-
54	Surplus Non Operasional		-	-		-		-	-
55	Surplus Penjualan Aset Non lancar								
56	Surplus Penyelesaian Kew. Jk Panjang								
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya								
58	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-		-		-	-
59	DEFISIT NON OPERASIONAL		-	-		-		-	-

60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar						-	
61	Defisit Penyelesaian Kew.Jk. Panjang						-	
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya						-	
63	Jumlah Defisit Non Operasional						-	
64	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OP						-	
65								
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR							
67								
68	POS LUAR BIASA							
69	Pendapatan Luar Biasa						-	
70	Beban Luar Biasa						-	
71	JUMLAH POS LUAR BIASA						-	
72								
73	SURPLUS/ DEFISIT- LO	-	7,194,593,713	-	2,086,420	-	14,912,160	- 7,181,767,973

- 7,181,767,973 -

Painan, 31 Desember 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21313 Fax. (0756) 21414 Painan

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 032/23/RK-BMD/BKPAD-PS/I-2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : SATRIA NOPIT
NIP : 19791121 201407 1 005
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II.b
Jabatan : Staf pada BKPSDM

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.
NIP : 19820706 200501 2 010
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Kabid Barang Milik Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per 31 Desember 2022, dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA

NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.
NIP. 19820706 200501 2 010

PIHAK PERTAMA

SATRIA NOPIT
NIP. 19791121 201407 1 005

Lampiran

Nomor : 032/23/RK-BMD/BKPAD-PS/I-2023

Tanggal : 9 Januari 2023

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
			(v)	(v)	
A.	ASET LANCAR	-			
	Persediaan	-	√		
B.	ASET TETAP	1,247,300,288			
	1. Tanah	-	√		
	2. Peralatan dan Mesin	2,304,456,955	√		
	3. Gedung dan Bangunan	1,318,459,924	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	76,952,650	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	49,725,248	√		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	(2,502,294,489)	√		
C.	ASET LAINNYA	-			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
	2. Aset Tidak Berwujud	98,377,355	√		
	3. Aset Lain-Lain	43,835,631	√		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98,377,355)	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(43,835,631)	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

-
-

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
			(v)	(v)	
A.	ASET LANCAR	-			
	Persediaan	-	√		
B.	ASET TETAP	1,300,360,288			
	1. Tanah	-	√		
	2. Peralatan dan Mesin	2,343,116,955	√		
	3. Gedung dan Bangunan	1,332,859,924	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	76,952,650	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	49,725,248	√		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	(2,502,294,489)	√		
C.	ASET LAINNYA	-			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
	2. Aset Tidak Berwujud	98,377,355	√		
	3. Aset Lain-Lain	43,835,631	√		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98,377,355)	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(43,835,631)	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

-
-

3. Jenis Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui (v)	Perbaikan (v)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD					
	Tanah	-	-	√		
	Peralatan dan Mesin	38,660,000	-	√		
	Gedung dan Bangunan	14,400,000	-	√		
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	√		
	Aset Tetap Lainnya	-	-	√		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	√		
	b. Hibah	-	-	√		
	c. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	-	-	√		
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	√		
	e. Putusan Pengadilan	-	-	√		
	f. Divestasi	-	-	√		
	g. Hasil Inventarisasi	-	-	√		
	h. Hasil tukar menukar	-	-	√		
	i. Pembatalan penghapusan	-	-	√		
	j. Perolehan/Penerimaan lainnya	-	-	√		
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau penyerahan BMD	-	-	√		
3	Penerimaan Internal Pengguna Barang	-	-	√		
4	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	-	-	√		
5	Reklasifikasi	-	-	√		
6	Koreksi	-	-	√		
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD	-	-	√		
	b. Penyerahan atau pengalihan status penggunaan BMD	-	-	√		
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	√		
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	√		
	e. Pemusnahan	-	-	√		
	f. Sebab lain	-	-	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

1.
2.
- dst.

PIHAK KEDUA

NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.
NIP. 19820706 200501 2 010

PIHAK PERTAMA

SATRIA NOPIT
NIP. 19791121 201407 1 005

REKON ASET OPD TAHUN 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Pembahasan	Hasil			
1	Nilai Belanja Modal Tahun 2022 / Realisasi Bulan Januari s/d 31 Desember 2022 (sesuai dengan Penambahan Belanja Modal pada Format Rekon)	Rp		38,660,000	
		KIB	A	Rp	-
		KIB	B	Rp	38,660,000
		KIB	C	Rp	-
		KIB	D	Rp	-
		KIB	E	Rp	-
		KIB	F	Rp	-
		Reklas Barjas	Rp	-	
		Ekstra	Rp	-	
2	Mutasi Tambah Belanja Modal selain pengadaan (Hibah/Barang Jasa yang dikapitalisir /Mutasi/Koreksi/Reklas) dengan rincian ; Belanja Barjas yang dikapitalisir Belanja Pegawai yang dikapitalisir	KIB	C	Rp	14,400,000
3	Mutasi Kurang Belanja Modal (BM yang yang dikapitalisir Penghapusan karena Hibah atau penjualan /Koreksi/Reklas) dengan rincian ;				14,400,000
					-
4	Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Tahun 2022	Pengadaan	Rp	38,660,000	
		Pemeliharaan	Rp	14,400,000	
5	Perkembangan Penyelesaian Aset Lainnya (Aset Dalam Penelusuran, Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dipakai Pihak Lain)				

Painan, 9 Januari 2023

Tim Rekonsiliasi

No.	Nama	OPD	Tanda Tangan
1	FERI CANDRA	Bid. BMD	
2	SUBCHAN KHALID	Bid. BMD	
3	RISKI FITRI ARISANDI	Bid. BMD	
4	ATIKA OKTAVIA	Bid. BMD	
5	SATRIA NOPIT	Pengurus Barang	

BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN

No. BAR- 28 /944/BPKPAD/1/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Hamda Sari, S.St
NIP : 19850921 200501 2 002
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Deriska Afni, S.K.M
NIP : 19860915 201001 2 032
Jabatan : PPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

telah melaksanakan rekonsiliasi **Realisasi Pendapatan, Belanja, dan SP2D sampai dengan 31 Desember 2022** dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	Rp1.200.000
2	Pendapatan Transfer		
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Jumlah		1.200.000	Rp1.200.000

No	Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	Rp7.769.501.519	Rp7.195.793.713
2	Belanja Modal	Rp41.388.846	Rp38.660.000
3	Belanja Tidak Terduga		
4	Belanja Transfer		
Jumlah		Rp7.810.890.365	Rp7.234.453.713

Catatan Seksi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d Desember	7.294.003.509,00

Laporan SKPD

No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas	
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional
1	s.d Desember	7.294.003.509,00	7.234.453.713,00	59.549.796,00	-
					59.549.796,00

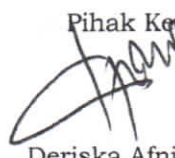
Catatatan : 1. Terdapat CP sampai Bulan Desember Sebesar Rp21.255.250 dan UYHD Rp38.294.546,00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Pertama,


Rahmi Hamda Sari, S.St
NIP. 19850921 200501 2 002

Pihak Kedua,


Deriska Afni, S.K.M
NIP. 19860915 201001 2 032

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini mengadakan pemeriksaan khusus Barang Pakai Habis / Stock Opname Barang Persediaan Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 709/12/SPT/Insp-PS/I/2023 tanggal 3 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap:

N a m a : SATRIA NOPIT
N I P : 19791121 201407 1 005
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang diangkat dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 954/56/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal Empat Januari 2022, tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, ditemui kenyataan sebagai berikut:

- Stock Awal Tahun 2022	Rp 1,123,420
- Penerimaan Barang Pakai Habis Tahun 2022 senilai	Rp 280,768,626
Jumlah Barang Pakai Habis Tahun 2022	Rp 281,892,046
- Pengeluaran Barang Pakai Habis Tahun 2022 senilai	Rp 281,379,886
Saldo Akhir Barang Pakai Habis T.A. 2022 senilai	Rp 512,160

Daftar Saldo/Stock Barang Pakai Habis /Persediaan terlampir.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan barang pakai habis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluannya.

Mengetahui:
Pengendali Teknis

Irma Yulia, S.Kom., M.M.
NIP. 19720721 199803 2 003

Pengurus Barang Pengguna,

SATRIA NOPIT
NIP.

Diketahui Oleh;
Pengguna Barang

TAMSIR, SH. MM
NIP. 19670312 198803 1 003

Painan, 6 Januari 2023
Tim Pemeriksa

1. Rio Syandra, S.S.T., S.T.

2. Rivvi Reny Midona, S.T.

3. Endang Hermiati, S.Pt.

4. Dian Permana Putra, S.E.

5. Rio Alfino, S.Kom.

6. Nova Susanti, A.Md.

7. Mega Liza A.

**RINCIAN PERSEDIAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN
JANUARI -DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PERSEDIAAN	Stock Awal Barang Per 2022	Pengadaan 2022	Total 2022	Pendistribusian 2022	Saldo 2022
1	Alat Tulis Kantor	Rp 883.180	Rp 144.527.986	Rp 145.411.166	Rp 144.899.006	Rp 512.160
2	Cetak Dan Penggandaan	Rp 240.240	Rp 98.653.300	Rp 98.893.540	Rp 98.893.540	Rp -
3	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp -	Rp 6.356.570	Rp 6.356.570	Rp 6.356.570	Rp -
4	Alat Kebersihan	Rp -	Rp 26.561.910	Rp 26.561.910	Rp 26.561.910	Rp -
5	Bahan Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Bahan Kimia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Bahan Obat-Obatan IFK	Rp -	Rp 818.860	Rp 818.860	Rp 818.860	Rp -
8	Materai & Benda POS	Rp -	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000	Rp -
9	Pembelian Pengisian Oksigen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10	Belanja Bahan Kedokteran(BMHP)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12	Obat Puskesmas dan Pustu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.123.420	Rp 280.768.626	Rp 281.892.046	Rp 281.379.886	Rp 512.160

Diketahui Oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia



TAMSIIR, SH. MM
Nip 19670312 198803 1 003

Painan, 06 Januari 2023

Pengurus Barang



SATRIANOPIT
NIP 19791121 201407 1 005

NB: Kondisi Stock awal disesuaikan dengan bahan yang sudah dishare sebelumnya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Koordinator Pengawasan | : Emilaloviza, S.Sos., M.M. |
| 2. Pengendali Teknis | : Irma Yulia, S.Kom., M.M. |
| 3. Ketua Tim | : Rio Syandra, S.S.T., S.T. |
| 4. Anggota | : Rivvi Reny Midona, S.T. |
| 5. Anggota | : Endang Hermiati, S.Pt. |
| 6. Anggota | : Dian Permana Putra, S.E. |
| 7. Anggota | : Rio Alfino, S.Kom. |
| 8. Anggota | : Nova Susanti, A.Md. |
| 9. Anggota | : Mega Liza A. |

Sesuai dengan Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/01/Insp-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 709/6186/SPT/Insp-PS/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, telah dilakukan Pemeriksaan UYHD Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dan telah melakukan Pemeriksaan Kas per 30 Desember 2022 kepada :

Nama : Yusri Japriska, S.E
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/223/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 11 April 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/31/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Uang Kertas Bank dan Uang Recehan | : Rp.....0,- |
| b. Saldo Bank | : Rp.....0,- |
| Jumlah | : Rp.....0,- |
| Saldo uang menurut Buku Kas | : Rp..... 0,- |
| Perbedaan Positif/Negatif | : Rp.....0,- |

Keterangan perbedaan:

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Kas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

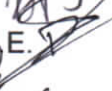
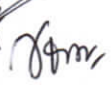
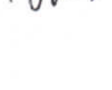
Bendahara Pengeluaran


Yusri Japriska, S.E
NIP. 19850107 200801 1 001

Diketahui Oleh
Pengendali Teknis,


Irma Yulia, S.Kom., M.M.
NIP. 19720721 199803 2 003

Tim Pemeriksa :

1. Rio Syandra, S.S.T., S.T. 
2. Rivvi Reny Midona, S.T. 
3. Endang Hermiati, S.Pt. 
4. Dian Permana Putra, S.E. 
5. Rio Alfino, S.Kom. 
6. Nova Susanti, A.Md. 
7. Mega Liza A. 

Diketahui oleh :
Kepala BKPSDM
Kabupaten Pesisir Selatan


Tamsir, S.H. M.M
NIP. 19670312 198803 1 003

Disetujui oleh:
Korwas,


Emilaloviza, S.Sos, M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas : 30 Desember 2022
Nama Penutupan Kas : Pemeriksaan UYHD Tahun 2022
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Desember 2021

Jumlah Penerimaan 01 Januari s/d 30 Desember 2022 = Rp. 7.472.367.503,-
Jumlah Pengeluaran 01 Januari s/d 30 Desember 2022 = Rp. 7.472.367.503,-
Saldo Buku Kas = Rp.....0,-
Saldo Kas Per 30 Desember 2022 = Rp.....0,-
Saldo Kas terdiri dari:

1. Kas Tunai:

Uang Kertas	: Rp. 100.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 50.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 20.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 10.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 5.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 2.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Kertas	: Rp. 1.000,- x	Lembar = Rp0,-
Uang Logam	: Rp. 500,- x	Koin = Rp0,-
Uang logam	: Rp. 200,- x	Koin = Rp0,-
Uang Logam	: Rp. 100,- x	Koin = <u>Rp0,-</u>
		= Rp0,-

2. Surat Berharga:

Sisa Panjar	= Rp0,-
Cheque	= Rp0,-
Wesel	= Rp0,-
Saldo Bank	= <u>Rp0,-</u>
	= Rp0,-
Total (Kas Tunai + Surat Berharga)	= Rp.....0,-

Perbedaan Saldo Buku dengan saldo Kas

= Rp.....0,-

Painan, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

Diketahui oleh:
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

Tamsir S.H. M.M
NIP. 19670312 198803 1 003


Yusri Japriksa, S.E
NIP. 19850107 200801 1 001

DATA UMUM PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN 2022

I. INFORMASI TENTANG OPD

a. **Nama OPD :BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

b. Kepala OPD : TAMSIR, SH .MM
NIP. 19670312 198803 1 003

c. Bendahara Pengeluaran : YUSRI JAFRISKA.SE
NIP. 19850107 200801 1 001

d. Pengurus Barang : SATRIA NOPIT
NIP.19791121 201407 1 005

e. Penyimpan Barang :
NIP.

II. KEADAAN BARANG PERSEDIAAN

Kadaan barang persediaan yang dikelola Pengurus/Penyimpan Barang diperoleh dari belanja langsung selama tahun anggaran 2022, menurut rekapitulasi laporan pengurus/penyimpan barang adalah:

Saldo Awal Barang Pakai Habis per 1 Jan. 2022	Rp 1.123.420
Pengadaan Tahun 2022	Rp 280.768.626
- Total Penerimaan 2022	Rp 281.892.046
- Total Pendistribusian/Pemakaian 2022	Rp 281.379.886
Saldo Akhir 2022	Rp 512.160

Painan , 06 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya manusi



TAMSIR, SH. MM
NIP.196703121988031003